



**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH EMPING SINGKONG DI KALURAHAN RINGINHARJO**

**COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE DEVELOPMENT OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES OF CASSAVA CHIPS IN RINGINHARJO SUBDISTRICT**

Rina Prastiwi<sup>1</sup>, Marita Ahdiyana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

<sup>2</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Article history:

Diterima 16-03-23

Diperbaiki 03-04-23

Disetujui 13-04-23

Kata Kunci:

*Collaborative governance*,  
Usaha Mikro Kecil dan  
Menengah, Pengembangan  
Usaha Mikro Kecil dan  
Menengah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo beserta hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Kemudian, teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo belum berjalan dengan optimal, dilihat dari indikator, yaitu 1) dialog tatap muka yang belum berjalan dengan optimal karena tidak adanya pertemuan seluruh *stakeholder*, 2) membangun kepercayaan yang belum berjalan optimal karena kurangnya pertemuan, 3) komitmen terhadap proses yang belum berjalan baik, 4) pemahaman bersama yang belum berjalan dengan optimal karena adanya program yang tidak berkelanjutan, dan 5) hasil sementara yang positif walaupun pelaku usaha belum bisa mengoperasikan *ecommerce*. Faktor penghambat, yaitu kurangnya forum tatap muka, kurangnya komitmen dari *stakeholder*, dan keterlibatan swasta yang masih kurang dalam pengembangan usaha UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo.

ABSTRACT

Keywords:

*Collaborative governance, Micro, Small, and Medium Enterprises, Development of Micro, Small, and Medium Enterprises*

*This research aimed to determine the process of collaborative governance in the development of MSME of cassava chips in Ringinharjo Subdistrict along with the obstacles that arised in its implementation. This research used descriptive qualitative approach. Data that collected by observation, interview, and documentation. The data validity checking technique uses the source triangulation technique. The data analysis techniques were carried out by data collecting, data reduction, data presenting and conclusions drawing. The results of this research indicated that process collaborative governance in the development of MSME of cassava chips in Ringinharjo Subdistrict had been not running optimally, seen from the indicators, namely 1) face-to-face dialogue that is running quite well because there is no meeting of all stakeholders, 2) building trust that had not been running optimally due to the lack of meetings, 3) commitment to processes that are not going well, 4) shared understanding that had not been running optimally due to an unsustainable program, and 5) positive interim results even though the business actors have not been able to operate e-commerce. The research found the lack of face-to-face forum, the lack of commitment from each stakeholder and the lack of involvement of the private sector as the inhibiting factors that happen in developing cassava chips MSME enterprises in Ringinharjo Subdistrict.*

## 1. Pendahuluan

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. UMKM bagi perekonomian Indonesia menjadi salah satu kontributor terbesar PDB dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari data tahun 2020 bahwa UMKM berkontribusi pada PDB Indonesia sebesar 61,97% dan dapat menyerap tenaga kerja sebesar 97% (BKPM, 2021). Kondisi ini berubah dengan datangnya pandemi *Covid-19* yang membuat UMKM tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai penopang perekonomian Indonesia secara optimal. Penyebab ketidakefektifan UMKM sebagai penopang perekonomian Indonesia adalah Kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang berisi tentang pembatasan mobilitas masyarakat diluar ruangan untuk mempercepat penanganan *Covid-19*. Kondisi tersebut sesuai dengan survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia terkait 87,5% UMKM di Indonesia merasakan dampak pandemi yang didalamnya ada 93,2% UMKM mengalami dampak negatif (Saputra, 2020). Kemudian, berdasarkan data BPS juga terdapat empat provinsi di Indonesia yang mengalami penurunan pendapatan lebih parah daripada provinsi lainnya. Adapun empat provinsi tersebut Bali mengalami penurunan pendapatan sebesar 92,18%, DIY sebesar 89,69%, DKI Jakarta sebesar 86,55% dan Banten sebesar 86,92% (Ika, 2020).

Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu provinsi dari empat provinsi di Indonesia yang mengalami penurunan pendapatan paling parah pada masa pandemi. DIY sebagai kota pelajar dan pariwisata, pandemi membuat banyak mahasiswa pulang kampung dan penurunan jumlah wisatawan ke DIY. Banyaknya mahasiswa yang pulang kampung karena kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dan kampus dilaksanakan secara daring. Hal tersebut secara langsung dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat yang menyediakan jasa tempat tinggal, cuci baju, makanan, dan lain-lain. Selain itu, juga terjadi penurunan jumlah wisatawan ke DIY yang signifikan pada masa pandemi berdampak pada penurunan pendapatan UMKM yang berada disekitar tempat wisata, penginapan, dan lain-lain (Kharisman, 2021).

Penurunan pendapatan DIY diakibatkan banyaknya mahasiswa yang pulang kampung, penurunan jumlah wisatawan, dan rendahnya pemanfaatan teknologi di UMKM. Berdasarkan data Bappeda DIY menyatakan bahwa DIY pada tahun 2021 memiliki UMKM sebanyak 337.465 yang hampir dari seluruh jumlah UMKM

tersebut belum menggunakan teknologi dalam usahanya, terlebih pada pemasaran dan penjualan (Bappeda DIY, 2022). Hal ini sesuai dengan data yang disampaikan oleh Sukamanta selaku politisi PKS bahwa 90,96% UMKM DIY masih secara manual dalam menjual hasil produksinya. Selain itu, sebanyak 81,66% UMKM DIY juga tidak menggunakan internet dalam usahanya. Padahal pada situasi penuh pembatasan aktivitas masyarakat di masa pandemi, penjualan online merupakan salah satu solusi bagi UMKM untuk memahami dan memanfaatkan teknologi agar dapat bersaing dan beradaptasi di masa pandemi (Edi, 2021).

Kabupaten Bantul sebagai daerah ke dua di DIY dengan UMKM terbanyak, yaitu 77.332 usaha juga mengalami penurunan pendapatan pada masa pandemi (Sibakul, 2022). Penurunan pendapatan Kabupaten Bantul sebesar Rp97 Milyar akibat UMKM sektor pariwisata dan kuliner mengalami kebangkrutan (Sidik, 2020). Adapun UMKM di Kabupaten Bantul yang teyang mengalami kesulitan pada pandemi adalah emping singkong di Kalurahan Ringinharjo. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sulistya Atmaja selaku Lurah Ringinharjo bahwa UMKM emping singkong mengalami kesulitan di masa pandemi berupa penurunan pendapatan (Wijaya, 2021). Penurunan pendapatan tersebut terjadi karena adanya empat kesulitan yang melanda UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo. Pertama, penurunan permintaan dari dalam daerah maupun luar daerah. Kedua, terhambatnya proses produksi. Ketiga, sulitnya pemasaran produk karena pelaku usaha emping singkong belum menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Keempat, ketidaksanggupan pelaku usaha emping singkong dalam membayar tagihan pinjaman dan upah karyawan.

UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo ini dapat bertahan di masa pandemi tidak terlepas dari potensi yang dimilikinya dan peran dari *stakeholder*. Potensi yang dimiliki oleh usaha emping singkong, yaitu sebagai ikon Kalurahan Ringinharjo yang dijadikan sebagai salah satu oleh-oleh khas Bantul, pemasaran yang telah merambah ke luar daerah bahkan luar negeri, inovasi pada kemasan dan rasa, dan layaknya usaha emping singkong untuk terus berproduksi karena biaya yang telah dikeluarkan untuk produksi akan mendapatkan beberapa kali lipat keuntungan (Latifah, 2020). Kemudian, peran *stakeholder* dari pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam bertahnya UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo dengan melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Dalam upaya untuk pengembangan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada masa pandemi sehingga usaha tersebut dapat bertahan perlu peranan dari beberapa *stakeholder* yang saling berkerjasama atau kolaborasi. Kolaborasi ini berupa kesepakatan antar *stakeholder* yang memiliki tujuan yang sama dalam mengatasi masalah publik tersebut. Kolaborasi antar *stakeholder* ini dapat disebut *collaborative governance*. Pengertian *collaborative governance* dibagi menjadi dua, yaitu kolaborasi dalam arti proses dan kolaborasi dalam arti normative. Kolaborasi dalam arti proses adalah serangkaian proses mengelola secara institusional yang didalamnya ada *stakeholder* pemerintah dan non pemerintah dengan kepentingan dan tujuannya masing-masing. Kolaborasi dapat dijalankan dengan institusi pemerintah saja, swasta saja, LSM lokal saja atau institusi yang berkolaborasi dengan pemerintah, LSM, dan swasta.

Kolaborasi dalam arti normatif adalah cara pemerintah untuk berinteraksi dengan *stakeholder* (Ansell dan Gash, 2008). Hal ini didukung dengan pendapat dari Purnomo (2018) bahwa dalam tata kelola pemerintahan, proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah melibatkan sektor bisnis, masyarakat, dan organisasi non pemerintah serta *stakeholder* lainnya yang terlibat dalam kolaborasi. Dengan pelibatan *stakeholder* tersebut diharapkan kolaborasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menyelesaikan dan mengatasi masalah besar yang tidak mungkin untuk diselesaikan oleh satu pihak saja. Karena tujuan tidak dapat dicapai jika hanya satu pihak saja, maka ketika kolaborasi sudah berjalan akan ada pertanggungjawaban dan konflik yang terlihat diantara *stakeholder*. Untuk itu perlu dilakukannya evaluasi yang mencerminkan seluruh *stakeholder* dan pihak eksternal dalam kolaborasi sehingga dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan (Emerson dan Nabatchi, 2015).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan proses *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2008) untuk meneliti kolaborasi antar *stakeholder* yang terlibat. Indikator keberhasilan *collaborative governance*, yaitu dialog tatap muka (*face to face*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), pemahaman bersama (*shared understanding*) dan hasil sementara. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini berjudul “*Collaborative goovernance* dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah emping singkong di Kalurahan Ringinharjo”.

## **2. Metode Penelitian**

### **2.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif dipilih oleh peneliti karena dapat menjelaskan suatu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Untuk mendapatkan penjelasan terkait fenomena sosial dapat dilakukan dengan observasi. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode deskriptif dalam penelitian ini karena membahas permasalahan yang sedang berkenaan dengan situasi. Berdasarkan pemaparan diatas, metode penelitian kualitatif deskriptif dipilih agar dapat memahami dan menganalisis tentang proses *collaborative governance* dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah emping singkong di Kalurahan Ringinharjo.

### **2.2. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Padukuhan Bantul Karang. Padukuhan Bantul Karang ini menjadi sentra emping singkong di Kabupaten Bantul yang menjadi perhatian dari beberapa *stakeholder*. Selain dilaksanakan di Padukuhan Bantul Karang, penelitian ini juga dilaksanakan di Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul, Bumkalma Trisabapari Manunggal Kapanewon Bantul, Kalurahan Ringinharjo, dan LPMK Kalurahan Ringinharjo. Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2022 – Desember 2022.

### 2.3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2017:132). Penentuan informan penelitian dilakukan dengan teknik *purposive* untuk informan penelitian yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian (Sugiyono, 2016:216). Informan penelitian dalam penelitian ini, yaitu Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul, Bumkalma Trisabapari Mangunggal Kapanewon Bantul, Kalurahan Ringinharjo, LPMK Kalurahan Ringinharjo, Kepala Dusun Padukuhan Ringinharjo, Kelompok Telo Mulyo, pelaku usaha dan karyawan emping singkong Bu Siti, dan masyarakat Padukuhan Bantul Karang RT 04.

### 2.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Observasi yang digunakan observasi non-partisipan. Peneliti berperan sebagai pengamat dan tidak ikut serta sebagai *stakeholder* yang melibatkan diri. Observasi terhadap aktivitas ekonomi usaha emping singkong di Kalurahan Ringinharjo.
2. Wawancara dilakukan dengan Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Mikro Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul, Manajer Tata Usaha Bumkalma Trisabapari Mangunggal Kapanewon Bantul, Ulu-Ulu Kalurahan Ringinharjo, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Kepala Dusun Bantul Karang, Ketua Kelompok Telo Mulyo, pelaku usaha Emping Singkong Bu Siti, karyawan Emping Singkong Bu Siti, dan masyarakat Padukuhan Bantul Karang RT 04.
3. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian antara lain lembar data monografi Padukuhan Ringinharjo, profil *stakeholder*, struktur organisasi *stakeholder*, foto, skripsi, jurnal ilmiah, berita di media sosial, Peraturan Bupati Kabupaten Bantul, undang-undang, dan data lainnya yang berkaitan dengan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah emping singkong di Kalurahan Ringinharjo.

### 2.5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah cara mengumpulkan data dengan sumber data lainnya yang berbeda (Sugiyono, 2016:273). Penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memeriksa kebenaran dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari informan penelitian terkait proses *collaborative governance* dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah emping singkong di Kalurahan Ringinharjo.

### 2.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif Miles dan Huberman (2014). Teknik analisis data ini adalah aktivitas mengolah data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas sehingga diperoleh data jenuh. Tahapan

yang dilakukan untuk menganalisis data yaitu pertama, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kedua, reduksi data dengan merangkum dan mengorganisasikan data agar mendapatkan data yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Ketiga, penyajian data dalam bentuk teks naratif deskriptif, gambar, dan tabel yang disesuaikan dengan indikator yang digunakan dengan memaparkan hasil penelitian. Keempat, penarikan kesimpulan dengan menjawab tujuan dari penelitian untuk mengetahui proses *collaborative governance* dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah emping singkong di Kalurahan Ringinharjo beserta hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya.

### 3. Hasil dan Pembahasan

*Collaborative governance* adalah tata kelola pemerintah yang didalamnya ada beberapa *stakeholder* selain pemerintah atau negara untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik (Ansell dan Gash, 2008). Hal ini berarti melibatkan berbagai *stakeholder* dari pemerintah dan non pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik secara bersama-sama. Berbagai *stakeholder* tersebut dikumpulkan dalam forum bersama dengan tujuan yang sama. Selain itu, kerjasama atau kolaborasi yang dijalankan antar *stakeholder* tersebut untuk saling menguntungkan atau bersifat saling menguntungkan masing-masing *stakeholder*.

Penelitian *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo bertujuan untuk mengetahui proses kolaborasi dalam pengembangan tersebut. Latar belakang dari penelitian ini berupa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo dimasa pandemi. Diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo dapat bertahan dan beradaptasi bahkan berkembang dimasa pandemi. Dalam kolaborasi ini melibatkan beberapa *stakeholder* dari pemerintah dan non-pemerintah. *Stakeholder* dari pemerintah, yaitu Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul, Bumkalma Trisabapari Mangunggal Kapanewon Bantul, dan Kalurahan Ringinharjo. Kemudian, *stakeholder* dari non-pemerintah, yaitu Kelompok Telo Mulyo. Akan tetapi, dalam proses kolaborasi ini terdapat hambatan, yaitu kurangnya forum tatap muka, tidak adanya perjanjian antar *stakeholder* dalam kolaborasi, dan keterlibatan Swasta yang Masih Kurang Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Emping Singkong di Kalurahan Ringinharjo.

Penelitian ini akan menganalisis proses *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses *collaborative governance* dan hambatan dalam proses kolaborasi. Dalam menganalisis proses *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo menggunakan teori Ansell dan Gash (2008), yaitu dialog tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), pemahaman bersama (*shared understanding*), dan hasil sementara (*intermediate outcomes*).

#### 1. Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialogue*)

Menurut Ansell dan Gash (2008), dialog tatap muka yang dilakukan oleh para *stakeholder* pemangku kepentingan merupakan dasar dibangunnya *collaborative governance*. Dialog tersebut mendorong lahirnya suatu kesepakatan antar *stakeholder* kepentingan. Dalam dialog tersebut berisi narasi tentang hubungan saling menguntungkan antar *stakeholder* kepentingan apabila berkolaborasi. Adapun dalam *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo melakukan dialog tatap muka dengan pertemuan, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Melalui pertemuan, pelatihan dan pendampingan ini menjadi salah satu media komunikasi dan koordinasi yang efektif untuk dilakukan antar *stakeholder*.

Dialog tatap muka pada *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo dilakukan dengan musyawarah antar desa (MAD), pelatihan, pendampingan, dan monitoring. MAD ini merupakan musyawarah antar desa yang dilakukan oleh Bumkalma Trisabapari Manunggal Kapanewon Bantul. MAD ini juga berupa proses dialog tatap muka yang formal dan dapat menghasilkan kesepakatan diakhir terkait pengembangan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo. Melalui MAD ini, perwakilan kelompok pemimjam salah satunya Kelompok Telo Mulyo akan menyampaikan permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi. Setelah *stakeholder* menyampaikan permasalahan dan kebutuhan tersebut dalam forum MAD, para *stakeholder* lainnya akan mengkaji dan menetapkan skala prioritas yang akan dilakukan pada periode selanjutnya agar kegiatan yang dilakukan dapat mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan. MAD ini dapat mempertemukan hampir seluruh *stakeholder* yang berkolaborasi kecuali Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul.

Sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan monitoring dilakukan oleh masing-masing *stakeholder* dalam kolaborasi ini. Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul dengan perwakilan Kelompok Telo Mulyo dalam sosialisasi, pelatihan dan pendampingan yang berkaitan dengan keterampilan pelaku usaha emping singkong serta pendataan yang dilakukan Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul. Kemudian, Kalurahan Ringinharjo dalam mendapatkan salah satu syarat untuk meminjam modal Bumkalma Trisabapari Mangunggal, melakukan sosialisasi dan pelatihan pemasaran secara *online* serta agenda promosi produk emping singkong melalui media TV dalam program Saba Desa di TVRI. Selain itu, Bumkalma Trisabapari Mangunggal memberikan sosialisasi dan pelatihan pembukuan terkait produksi emping singkong. Selain itu juga tidak lepas dari peran masyarakat dalam pengembangan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo. Masyarakat dalam pengembangan ini diberdayakan terutama adalah ibu rumah tangga. Mereka menjadi buruh ditempat pengusaha emping singkong dengan mengambil bahan mentah emping dalam bentuk *gethuk*, menumbuknya dirumah, mengeringkan, dan menyetorkan kembali ke pelaku usaha emping singkong jika sudah kering.

Padahal dialog tatap muka ini membuat komunikasi dan koordinasi yang dilakukan antar *stakeholder* dapat berjalan efektif. Melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) yang merupakan alat komunikasi dan koordinasi antar *stakeholder* ini ditujukan untuk *stakeholder* agar dapat saling memahami dan bekerja sesuai dengan tugasnya yang telah disepakati. Kemudian, dengan rasa saling memahami dan menjalankan tugasnya dengan baik akan berdampak juga pada tumbuhnya rasa

saling percaya antar *stakeholder*. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Emerson (2012) bahwa melalui dialog tatap muka dapat menciptakan kepercayaan di antara *stakeholder* yang berkolaborasi dengan komunikasi langsung dan saling terbuka untuk mengatasi perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam kolaborasi. Selain MAD, komunikasi dan koordinasi antar *stakeholder* dapat dilakukan dengan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang dilaksanakan oleh Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul, Bumkalma Trisabapari Mangunggal, dan Kalurahan Ringinharjo dengan Kelompok Telo Mulyo sebagai sasarannya. Hal ini menjadi alat komunikasi yang penting dalam kolaborasi ini karena pemanfaatan teknologi dalam pengembangan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo masih kurang. Padahal pada saat pandemi hingga saat ini pemanfaatan teknologi dapat membantu dan mengatasi permasalahan dalam belum bisanya mempertemukan seluruh *stakeholder* dalam satu forum. Adapun *stakeholder* yang memanfaatkan teknologi adalah Bumkalma Trisabapari Manunggal dengan Kelompok Telo Mulyo berupa grub *Whats App*.

Proses dialog tatap muka pada *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo dapat disimpulkan bahwa proses dialog tatap muka antar *stakeholder* berjalan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya pertemuan atau forum yang dapat mempertemukan seluruh *stakeholder* dan adanya kemunduran proses dialog tatap muka antara Dinas KUKMPP dengan Kelompok Telo Mulyo.

## 2. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Membangun kepercayaan merupakan salah satu proses penting. Karena dapat menjadi ukuran keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kolaborasi. Dalam membangun kepercayaan dibutuhkan waktu yang cenderung lama dan komitmen yang tinggi (Ansell dan Gash, 2008). Adapun salah satu cara untuk membangun kepercayaan antar *stakeholder* kepentingan melalui proses dialog. Melalui kepercayaan ini antar *stakeholder* akan berkerjasama untuk menyelesaikan masalah publik secara bersama-sama dengan saling membagi informasi dan tanggung jawab. Hal tersebut berarti *stakeholder* juga bersama-sama bertanggung jawab dan menanggung resiko yang muncul dalam proses kolaborasi.

Koordinasi dan komunikasi merupakan cara membangun kepercayaan antar *stakeholder* pada *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo. Koordinasi dan komunikasi yang dilaksanakan dalam kolaborasi ini berupa pertemuan, sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Untuk membangun kepercayaan juga dibutuhkan intensivitas dalam melakukan pertemuan, sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Hal tersebut tidak dilakukan oleh beberapa *stakeholder* dalam kolaborasi ini. Padahal kepercayaan adalah hal utama atau pilar utama dalam kolaborasi (Emerson, 2012). Hal ini disebabkan karena keterbatasan dan intensivitas pertemuan antar *stakeholder* yang kurang. Pertemuan yang belum bisa mengumpulkan seluruh *stakeholder* kolaborasi untuk saling menyampaikan pendapat terkait kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi, mendiskusikan rencana yang akan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah, juga melakukan monitoring dan evaluasi bersama terkait rencana yang telah dilaksanakan.



Pertemuan, sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan antara satu *stakeholder* dengan *stakeholder* lainnya atau hanya dilakukan oleh dua *stakeholder* saja dengan intensivitas yang sangat kurang, yaitu Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul dan Kalurahan Ringinharjo. Hal ini menyebabkan beberapa penyelesaian atau solusi yang diberikan oleh Pemerintah kurang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha emping singkong. Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan *stakeholder* diatas berbeda dengan komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dengan pelaku usaha emping singkong di Kalurahan Ringinharjo cukup baik. Masyarakat berperan dalam mempromosikan produk emping singkong melalui status *Whats App*. Dari promosi yang dilakukan masyarakat ini menunjukkan bahwa masyarakat berupaya untuk membangun kepercayaan pelanggan dan membantu usaha emping singkong untuk bertahan di masa pandemi.

Proses membangun kepercayaan dalam *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo dapat disimpulkan bahwa kurang berjalan optimal. Ketidakefektifan komunikasi dan koordinasi untuk membangun kepercayaan dilakukan oleh Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul dan Kalurahan Ringinharjo terkait intensivitas pertemuan yang masih kurang bahkan tidak tentu atau tidak jelas. Kemudian, belum adanya forum yang dapat menggumpulkan dan mempertemukan seluruh *stakeholder* untuk berkomunikasi dan berkoordinasi terkait UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo. Dengan beberapa permasalahan tersebut akan menyebabkan adanya beberapa kendala informasi sehingga terjadi salah paham antar *stakeholder*. Hal ini dapat menghambat kelancaran proses kolaborasi yang berjalan.

### 3. Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to Process*)

Menurut Ansell dan Gash (2008), komitmen terhadap proses kolaborasi merupakan hal yang penting karena kolaborasi berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan menimbulkan ketergantungan antar *stakeholder* kepentingan. Ketergantungan ini dapat dijadikan sebagai salah satu cara meningkatkan komitmen para *stakeholder* pemangku kepentingan. Kemudian, untuk menciptakan ketergantungan antar *stakeholder* dalam kolaborasi diperlukan sesuatu yang jelas, adil, dan transparan dari masing-masing *stakeholder*. Hal tersebut dapat dilihat dari pembagian peranan dan fungsi masing-masing *stakeholder* dalam kolaborasi.

Pada *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo yang melibatkan berbagai *stakeholder*, yaitu Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul, Bumkalma Trisabapari Mangunggal, Kalurahan Ringinharjo, LPMK Kalurahan Ringinharjo, Kelompok Telo Mulyo, dan masyarakat Padukuhan Bantul Karang RT 04. Komitmen terhadap proses dilakukan oleh masing-masing *stakeholder* sesuai dengan peranan dan fungsinya. Pertama, Dinas KUKMPP menunjukkan bentuk komitmennya dalam pengembangan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo dengan melakukan pendataan dan memberikan sosialisasi dan pelatihan yang sesuai dengan Kelompok Telo Mulyo. Kedua, Bumkalma Trisabapari Mangunggal sebagai pihak penambah modal memiliki komitmen terhadap proses paling baik dibandingkan *stakeholder* lainnya. Bumkalma Trisabapari Mangunggal tetap memberikan tambahan modal

setiap tahunnya kepada pelaku usaha emping singkong di Kalurahan Ringinharjo walau di masa pandemi. Selain itu, dari pelaku usaha emping singkong di Kalurahan Ringinharjo ini juga tertib dalam membayar anggur. Ketiga, Kalurahan Ringinharjo di masa pandemi berupaya untuk berperan dalam pengembangan UMKM emping singkong dengan memberikan sarana promosi berupa peliputan dari TVRI pada tahun 2021 karena sosialisasi dan pelatihan yang telah berhenti untuk pelaku usaha emping singkong di tahun 2020. Keempat, LPMK Kalurahan Ringinharjo yang sebagai lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, khususnya dibidang perekonomian tidak berjalan. Padahal Padukuhan Bantul Karang sebagai sentra industri emping singkong di Kabupaten Bantul dan sebagai salah satu produk kebanggaan bahkan ikon dari Kalurahan Ringinharjo sudah sepatasnya mendapatkan peranan LPMK di bidang pembangunan ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kelima, Kelompok Telo Mulyo kurang menunjukkan komitmennya dalam pengembangan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo. Hal ini dilihat dari kurangnya partisipasi dari Kelompok Telo Mulyo dalam sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul. Keenam, masyarakat yang tetap bekerja menjadi buruh emping singkong di masa pandemi walaupun keadaan ekonomi yang sulit juga. Selain itu, dalam kolaborasi ini juga masih belum adanya ketetapan peraturan yang disetujui oleh seluruh *stakeholder* yang dapat mengikat *stakeholder* untuk tetap berperan dalam kolaborasi. Hal ini didukung dengan pernyataan Ansell dan Gash (2008) bahwa pembentukan komitmen terhadap proses dapat dilakukan dengan menetapkan aturan kolaborasi yang disetujui oleh seluruh *stakeholder*. Selain itu, Emerson (2012) juga menyatakan bahwa kolaborasi jangka panjang membutuhkan norma informal dalam bentuk prosedur dan dilengkapi dengan faktor desain kelembagaan yang lebih formal, seperti hukum, peraturan, dan regulasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, komitmen terhadap proses pada *collaborative governace* dalam pengembangan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo dapat disimpulkan bahwa belum berjalan dengan baik walaupun tidak ada tumpang tindih program yang dilaksanakan oleh *stakeholder* yang bekerjasama dalam kolaborasi tersebut. Selain itu juga, pembagian tugas untuk masing-masing *stakeholder* sudah sesuai dengan peranannya. Akan tetapi ada *stakeholder* yang belum bisa dan tidak menjalankan tugasnya. Dengan adanya beberapa *stakeholder* yang tidak menjalankan tugasnya berarti kerjasama yang dijalankan pada kolaborasi ini juga belum berjalan dengan baik. Hal ini akan menjadi penghambat tercapainya tujuan dalam kolaborasi ini.

#### 4. Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)

Menurut Ansell dan Gash (2008), saling memahami berarti para *stakeholder* kepentingan perlu untuk mengembangkan pemahaman pada titik tertentu. Pemahaman yang perlu untuk dikembangkan secara bersama-sama berupa tujuan, masalah dan nilai yang didapatkan dalam kolaborasi. Ketika *stakeholder* yang berkolaborasi memahami tujuan bersama dilakukan kolaborasi maka itu merupakan pemahaman bersama yang baik. Dengan pemahaman yang baik maka kolaborasi tersebut mudah untuk dicapai dan dapat meminimalisir kesalahan.

Dalam penelitian *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo bentuk saling memahai antar *stakeholder* melalui komunikasi yang dilaksanakan dengan kegiatan pendataan, pertemuan untuk perencanaan, dan musyawarah serta promosi yang mendukung pencapaian pengembangan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo. Pendataan dilakukan oleh Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul yang ditujukan untuk mengetahui usaha emping singkong yang dimiliki oleh pelaku usaha emping singkong di Padukuhan Bantul Karang masih memproduksi atau tidak. Pendataan ini merupakan hal penting bagi Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul untuk menentukan program ataupun kegiatan pelatihan yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi oleh pelaku usaha emping singkong di Kalurahan Ringinharjo. Pertemuan untuk perencanaan dilakukan oleh Bumkalma Trisabapari Mangunggal melalui musyawarah yang diadakannya setiap satu tahun sekali, yaitu Musyawarah Antar Desa (MAD). Melalui MAD ini pelaku usaha yang meminjam modal dari Bumkalma Trisabapari Mangunggal dapat menyampaikan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi khususnya pada permodalan. Hal tersebut akan ditindaklanjuti dengan perencanaan upaya pemenuhan kebutuhan dan mengatasi permasalahan terkait modal yang akan dialokasikan pada tahun berikutnya setelah diadakannya MAD. Salah satu pelaku usaha yang diundang dan menghadiri MAD tersebut adalah pelaku usaha emping singkong di Kalurahan Ringinharjo. Pendataan yang dilakukan oleh Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul dan penyampaian kebutuhan dan masalah di MAD sebagai upaya untuk menghindari kesalahpahaman dan kegiatan yang akan dilakukan dapat berdampak dengan baik kepada pelaku usaha emping singkong di Kalurahan Ringinharjo. Hal ini sesuai dengan pendapat Emerson (2012) bahwa pemahaman bersama itu dapat membantu menghindari kesalahpahaman, perbedaan persepsi, dan dapat menciptakan suatu pedoman yang sama bagi *stakeholder* yang berkolaborasi. Selanjutnya, Kalurahan Ringinharjo juga berupaya tetap berkontribusi dalam pengembangan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo melalui sarana promosi yang diberikannya kepada pelaku usaha emping singkong berupa peliputan dari TVRI Jogja dalam program Saba Desa. Kemudian, masyarakat dalam hal ini menunjukkan sikap saling memahami antara satu sama lain dengan pelaku usaha emping singkong terkait permasalahan yang dihadapi usaha emping singkong di Kalurahan Ringinharjo. Dengan adanya sikap memahami dan memaklumi antar *stakeholder* maka pemahaman bersama terjalin dengan baik antara kedua belah pihak.

Dapat disimpulkan bahwa proses pemahaman bersama antar *stakeholder* berjalan kurang optimal walaupun dengan pembagain tugas sudah baik dan seluruh *stakeholder* tetap memiliki tujuan yang sama yaitu mengembangkan UMKM agar dapat bertahan di masa pandemi. Hal ini dikarenakan adanya kemunduran dari Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul dalam komunikasi dan koordinasi dengan Kelompok Telo Mulyo. Selain itu, Kalurahan Ringinharjo juga telah tidak melanjutkan program pelatihan yang lebih bawah dari Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul.

##### 5. Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Hasil antara (pertengahan) menjadi pendorong keberlanjutan kolaborasi antar *stakeholder* kepentingan. Karena dengan hasil antara (pertengahan) yang nyata dapat dirasakan walaupun kecil keuntungannya bagi *stakeholder* kepentingan. Hal tersebut dapat membuat kepercayaan dan komitmen tumbuh dengan baik. Selain itu, dengan adanya hasil sementara yang positif akan membangun momentum untuk keberhasilan kolaborasi (Ansell dan Gash, 2008).

Pada penelitian *collaborative governance* dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah emping singkong di Kalurahan Ringinharjo yang memiliki tujuan untuk mengembangkan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo agar dapat bertahan, pulih, bahkan berkembang di masa pandemi, hasil sementara dapat tercapai melalui pelatihan dan bantuan modal dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan teknologi untuk pemasaran dan penjualan yang sangat sesuai sebagai salah satu solusi permasalahan di masa pandemi. Selain itu, penjualan emping singkong pada akhir tahun 2021 juga telah mengalami kenaikan.

Emping Singkong Bu Siti telah memiliki toko di *ecommerce* untuk penjualan dan media sosial untuk pemasaran. Emping Singkong Bu Siti dapat dipesan melalui *Shopee* dan Tokopedia. Emping Singkong Bu Siti juga memiliki *Instagram* untuk promosi produknya. Dari *ecommerce* dan media sosial yang dimiliki oleh Emping Singkong Bu Siti ini tidak dioperasikan lagi oleh pelaku usaha tersebut. Hal ini disebabkan tidak bisanya pelaku usaha untuk mengoperasionalkannya dan memilih lebih menggunakan *Whats Up* dan *offline*. Walaupun begitu ada beberapa distributor dari Emping Singkong Bu Siti yang telah memasarkan dan menjualkan emping singkong Bu Siti lebih dulu sebelum Emping Singkong Bu Siti memiliki toko di *ecommerce*. Selain itu, emping singkong Bu Siti ini juga belum masuk dalam web penjualan yang dimiliki pemerintah.

Setelah peraturan pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ringan dari sebelumnya diberlakukan oleh pemerintah, mengakibatkan permintaan emping singkong dari dalam daerah dan luar daerah mengalami kenaikan. Untuk bertahan sampai waktu tersebut, UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo khususnya Emping Singkong Bu Siti juga dipengaruhi oleh dana bantuan sebesar Rp 2,4 juta dari pemerintah untuk bantuan modal. Usaha yang pada awal masa pandemi mengalami penurunan permintaan yang mengakibatkan tidak bisa memproduksi setiap hari, pada akhir tahun 2021 mengalami kenaikan permintaan sehingga dapat memproduksi setiap hari kembali sampai saat ini dengan hari minggu sebagai hari libur. Hal ini dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung karena masyarakat memberikan kontribusi secara nyata sebagai karyawan dalam pengembangan UMKM emping singkong.

Dapat disimpulkan bahwa hasil sementara pada *collaborative governance* dalam usaha mikro, kecil, dan menengah emping singkong di Kalurahan Ringinharjo menunjukkan hasil yang positif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan antar *stakeholder*. Hal ini dilihat dengan bertahannya usaha emping singkong di Kalurahan Ringinharjo di masa pandemi hingga saat ini. Walaupun masih ada beberapa kekurangan karena belum bisa mengoperasikan *ecommerce* dan media sosial oleh pelaku usaha emping singkong serta belum adanya produk UMKM

emping singkong di web penjualan milik pemerintah produk. Adanya kebaruaran ini bukan suatu yang sulit tetapi perlu adanya penyesuaian dari pelaku usaha emping singkong di Padukuhan Bantul Karang dengan teknologi. Selain itu, dengan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah sangat berarti bagi pelaku usaha emping singkong di Kalurahan Ringinharjo untuk tetap bertahan di masa pandemi.

## **2.1. Hambatan Proses Collaborative Governance Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kalurahan Ringinharjo**

### **1. Kurangnya Forum Tatap Muka**

Proses *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo memiliki kekurangan forum tatap muka. Kurangnya forum tatap muka ini menyebabkan komunikasi, koordinasi, dan diskusi tidak dapat berjalan baik. Komunikasi, koordinasi, dan diskusi seharusnya dilaksanakan oleh seluruh *stakeholder* agar dapat membahas program masing-masing yang saling berkaitan sehingga tidak tumpang tindih ataupun salah sasaran. Proses tatap muka dalam kolaborasi ini belum bisa menyelenggarakan pertemuan seluruh *stakeholder*, hanya sebatas pertemuan antar dua *stakeholder* sampai pertemuan yang dihadiri oleh hampir seluruh *stakeholder* kecuali Dinas KUKMPP.

Kurangnya forum tatap muka ini menyebabkan ketidaksesuaian bantuan ataupun program yang dijalankan dan diberikan kepada pelaku usaha emping singkong di Kalurahan Ringinharjo. Hal ini membuktikan bahwa komunikasi, koordinasi, dan diskusi dalam kolaborasi pengembangan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo tidak berjalan dengan baik. Padahal komunikasi, koordinasi, dan diskusi sangat penting untuk kelancaran proses kolaborasi. Dengan komunikasi, koordinasi, dan diskusi dalam kolaborasi ini yang tidak berjalan dengan baik akan menyebabkan proses kolaborasi akan terhambat. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya perbaikan dari para *stakeholder* dalam komunikasi, koordinasi, dan diskusi. *Stakeholder* dapat melakukan komunikasi, koordinasi, dan diskusi melalui pemanfaatan teknologi apabila tidak adanya waktu untuk duduk bersama dalam suatu forum.

### **2. Kurangnya Komitmen dari Masing-Masing *Stakeholder***

Pada *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo komitmen dari masing-masing *stakeholder* masih kurang atau tidak optimal. Padahal komitmen merupakan faktor penting dalam kolaborasi. Komitmen ini penting karena dengan adanya komitmen dari masing-masing *stakeholder*, kolaborasi dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan kolaborasi yang telah disepakati. Hal ini juga berarti apabila komitmen dari masing-masing *stakeholder* tidak ada atau kurang akan menyebabkan kolaborasi tidak berjalan dengan baik sehingga sulit untuk mencapai tujuan kolaborasi. Komitmen masing-masing *stakeholder* yang masih kurang dalam kolaborasi pengembangan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo dilihat dari adanya beberapa *stakeholder* yang kurang menjalankan perannya untuk ikut mengembangkan UMKM emping singkong supaya bisa bertahan dan beradaptasi

bahkan berkembang di masa pandemi, yaitu Kalurahan Ringinharjo dan Kelompok Telo Mulyo.

### 3. Keterlibatan Swasta yang Masih Kurang dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Emping Singkong di Kalurahan Ringinharjo

Pada *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo keterlibatan swasta masih kurang. Pihak swasta yang merupakan bank sebagai penyedia tambahan modal produksi hanya terlibat dengan masing-masing pelaku usaha tanpa adanya kerjasama dengan Kelompok Telo Mulyo. Bank ini tidak terlibat secara langsung dan tidak ikut dalam kolaborasi penembangan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo. Bank hanya sebagai penyedia tambahan modal yang menjadi urusan masing-masing dari pelaku usaha emping singkong.

Dalam penelitian ini bahwa proses *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo maka dapat disimpulkan bahwa belum berjalan optimal. Hal ini didasarkan pada analisis proses kolaborasi dari Ansel dan Gash. Indikator yang digunakan untuk menganalisis proses kolaborasi terdapat beberapa indikator yang tidak berjalan dengan baik atau tidak optimal. Selain itu, ada juga beberapa hambatan dalam proses kolaborasi ini.

## 4. Kesimpulan

Proses *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo belum berjalan optimal. Dapat dikatakan kolaborasi tersebut belum berjalan optimal dikarenakan adanya hambatan, yaitu komunikasi dan koordinasi antar *stakeholder* yang belum berjalan dengan baik atau maksimal karena kurangnya forum komunikasi dan adanya *stakeholder* yang kurang dalam menjalankan perannya sehingga dapat berakibat pada komitmen *stakeholder* tersebut dalam kolaborasi. Hambatan tersebut timbul karena beberapa indikator dalam proses *collaborative governance* dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah emping singkong di Kalurahan Ringinharjo juga kurang optimal.

Pertama, indikator dialog tatap muka (*face to face dialogue*) belum berjalan optimal karena pertemuan yang belum bisa mempertemukan seluruh *stakeholder* dalam satu forum dan adanya kemunduran dalam proses dialog tatap muka antara Dinas KUKMPP dengan Kelompok Telo Mulyo. Kedua, membangun kepercayaan (*trust building*) juga kurang berjalan optimal karena komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Dinas KUKMPP dan Kalurahan Ringinharjo masih kurang intensif. Ketiga, komitmen terhadap proses (*commitment to process*) belum berjalan dengan baik akibat ada *stakeholder* yang belum bisa dan tidak menjalankan tugasnya dalam pengembangan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo. Keempat, pemahaman bersama (*shared understanding*) belum berjalan optimal juga walaupun pembagian tugas sudah baik tetapi ada *stakeholder* dalam kolaborasi ini yang tidak berkelanjutan menjalankan tugasnya. Kelima, hasil sementara (*intermediate outcomes*) menunjukkan hasil yang positif dapat bertahan

di masa pandemi karena bantuan yang diberikan oleh para *stakeholder*, terutama pemerintah.

Dalam penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh sebuah temuan penting dari kebaruan dalam proses *collaborative governance* dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah emping singkong di Kalurahan Ringinharjo. Selain itu, dalam penelitian ini memperoleh data dari *collaborative governance* melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah emping singkong di Kalurahan Ringinharjo.

### Saran

Dalam penelitian *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo yang memaparkan permasalahan dan hambatan yang ada dalam kolaborasi tersebut. Untuk itu, saran untuk kedepannya sebagai berikut:

1. Perlu diadakan forum dialog tatap muka yang dapat mempertemukan seluruh *stakeholder* atau antar *stakeholder* yang berkolaborasi secara rutin untuk komunikasi dan koordinasi agar berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menghambat proses berjalannya kolaborasi. Pertemuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi seperti *Zoom*, *Google Meet*, *Whats app*, dan aplikasi lainnya yang mendukung.
2. Perlu diadakannya kesepakatan bersama yang disetujui oleh *stakeholder*. Dengan adanya kesepakatan bersama ini akan membuat *stakeholder* merasa memiliki peran dan tanggung jawab dalam proses kolaborasi sehingga dapat lebih komitmen terhadap proses untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, juga perlu adanya kegiatan yang dapat meningkatkan sinergitas antara *stakeholder* yang berkolaborasi dalam pengembangan UMKM emping singkong di Kalurahan Ringinharjo agar menjadi lebih baik. Adapun *stakeholder* tersebut, yaitu Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul, Bumkalma Trisabapari Kapanewon Bantul, Kalurahan Ringinharjo, LPMK Kalurahan Ringinharjo, Kelompok Telo Mulyo, pelaku usaha emping singkong, karyawan, dan masyarakat RT 04 Padukuhan Bantul Karang.

*Stakeholder* dalam kolaborasi sebaiknya melakukan sosialisasi, pendampingan, pelatihan, monitoring, dan evaluasi yang berkelanjutan sehingga tujuan dari program yang dilaksanakan dapat tercapai. Kemudian, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara bertahap dan terstruktur agar diketahui kekurangan dari sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang telah dilakukan sehingga dapat diperbaiki pada sosialisasi, pelatihan dan pendampingan yang akan dilaksanakan.

### Referensi

- [1] Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in theory and practice. Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- [2] Bappeda DIY. UMKM Koperasi dan UKM-List Data Dasar. Diakses pada 12 April 2022, dari [http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data\\_dasar/index/107-umkm](http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/107-umkm)

- [3] BKPM. (2021). Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia. Diakses pada 12 April 2022, dari <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>
- [4] Edi, P. (2021). 80 Persen UMKM di DIY Belum Melek Teknologi Internet. Diakses pada 14 April 2022, dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/80-persen-UMKM-di-diy-belum-melek-teknologi-internet.html>
- [5] Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Evaluating the Productivity of Collaborative Governance Regimes: A Performane Matrix*. *Public Performance and Management Review*, 38(4), 717-147.
- [6] Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). *An integrative framework for collaborative governance*. *Journal of Public Administration Research and Teory*, 22(1), 1-29.
- [7] Ika R, P. (2020). Bali Jadi Provinsi dengan Penurunan Pendapatan Paling Parah Akibat Covid-19. Diakses pada 29 Maret 2022, dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4372887/bali-jadi-provinsi-dengan-penurunan-pendapatan-paling-parah-akibat-covid-19>
- [8] Kharisman, A. S., & Atmojo, M. E. (2021). Responsivitas Dinas Koperasi, UMKM dan Penidustrian Kabupaten Bantul Dalam Mengangani UMKM yang terdampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 97-110.
- [9] Lathifah, U. (2020). *Analisis Usaha Emping Singkong Di Pedukuhan Bantul Karang Kalurahan Ringinharjo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul*. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- [10] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- [11] Moleong, L. J. (2017). *Metodelogi Penilitia Kualitaitf*. PT Remaja Rosdakarya.
- [12] Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- [13] Purnomo, E. P., Ramdani, R., Setyadiharja, R., & Muzwardi, A. (2018). *Collaborative Governance dalam Tata Kelola Hutan Berbasis Masyarakat*. Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- [14] Saputra. (2021). Survei BI: 87,5 Persen UMKM Indonesia Terdampak Pandemi Covid-19. Diakses pada 13 April 2022, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210319/9/1370022/survei-bi-875-persen-umkm-indonesia-terdampak-pandemi-covid-19>
- [15] Sibakul Jogja. Daya UKM”, dalam Sibakuljogja. Diakses pada 13 April 2022, dari [https://sibakuljogja.jogjaprov.go.id/publik/diy\\_map\\_umkm.php](https://sibakuljogja.jogjaprov.go.id/publik/diy_map_umkm.php)
- [16] Sidik, H., & Ahmad, W. (2020). Akibat Covid-19, Bantul Kehilangan PAD Sebesar Rp 97 Miliar. Diakses pada 13 April 2022, dari <https://www.antaraneews.com/berita/1524788/akibat-covid-19-bantul-kehilangan-pad-sebesar-rp97-miliar>
- [17] Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- [18] Wijaya, S. (2021) Pandemi, Kampung Emping Ketela Tetap Eksis. Diakses pada 8 Maret 2022, dari <https://koranbernas.id/pandemi-kampung-emping-ketela-tetap-eksis>